

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Masalah**

Sektor pertanian merupakan prioritas pembangunan di negara sedang berkembang. Pembangunan pertanian tersebut memiliki tujuan memperbaiki mutu konsumsi dan memenuhi kebutuhan bahan pangan secara nasional.

Proses pembangunan pertanian menunjukkan secara nyata mengenai peranan pendidikan sebagai unsur yang esensial dalam proses pembangunan pertanian itu sendiri. Keberhasilan pembangunan pertanian itu sendiri ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sistem pertanian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pemberdayaan sumber daya manusia di bidang pertanian perlu ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian merupakan suatu cara atau sistem pendidikan non formal (di luar bangku sekolah) untuk para petani dan keluarganya di pedesaan. Menurut Sugarda (1975, dalam effendi,2005), penyuluh pertanian merupakan usaha atau kegiatan pendidikan non formal untuk menimbulkan perubahan atau kegiatan pendidikan non formal untuk menimbulkan perubahan perilaku dari sasaran sesuai dengan yang dikehendaki atau diinginkan. Kegiatan penyuluhan pertanian mampu memberikan kontribusi

yang nyata dalam meningkatkan produksi komoditi pertanian dan pendapatan petani. Menurut Mosher (1986 dalam Effendi, 2005), penyuluhan pertanian adalah suatu pendidikan di luar bangku sekolah yang mempunyai sifat:

- a. Diberikan kepada masyarakat pedesaan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang dirasakan pada waktu tertentu yang berhubungan dengan mata pencahariannya serta usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- b. Mempergunakan teknik pendidikan khusus.
- c. Dijalankan dengan bantuan berbagai kegiatan, alat-alat, survey, percobaan, evaluasi dan lain-lain.
- d. Diselenggarakan dalam suasana kerja sama dengan saling harga menghargai.

Pemerintah telah mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menjaga kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan. RPPK diharapkan dapat mendudukan dan memberdayakan penyuluh pertanian sebagai bagian yang penting dari pembangunan pertanian melalui pengembangan sistem penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani dalam meningkatkan kompetensi ilmu dan teknologi, kewirausahaan, manajerial bekerja dalam tim, berorganisasi, bermitra usaha dan memiliki integritas moral tinggi.

Dalam rangka mendukung RPPK dan program aksi pematapan sistem penyuluhan pertanian, pemerintah mencanangkan pengembangan Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Model. BP3K Model merupakan percontohan kelembagaan penyuluhan kecamatan yang dirancang untuk menyediakan fasilitas pembelajaran dan jasa konsultasi agribisnis yang memadai dan mampu memberikan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. BP3K Model juga mempermudah penyuluh dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh pertanian melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyuluh dalam menjalankan tugasnya.

Kelembagaan penyuluhan pemerintah yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yaitu, pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakorluh PPK), pada tingkat kabupaten atau kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) dan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K).

Berdasarkan keputusan kepala sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung Nomor 800/071/IV.01/2010 ditetapkan sebanyak 25 BP3K yang dijadikan BP3K Model. Daftar BP3K yang menjadi BP3K Model Provinsi Lampung tahun 2008 sampai tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar BP3K yang menjadi BP3K Model di Provinsi Lampung tahun 2008 dan 2010

No	Kabupaten	Nama BP3K Model 2008	Nama BP3K Model 2010
1.	Lampung Timur		BP3K Sukadana BP3K Sekampung BP3K Melinting
2.	Bandar Lampung		BP3K Kemiling
3.	Way Kanan		BP3K Banjit
4.	Lampung Utara	BP3K Abung Semuli	BP3K Bunga Mayang BP3K Kotabumi Utara BP3K Sungkai Jaya
5.	Metro		BP3K Metro Barat BP3K Metro Timur
6.	Lampung Barat	BP3K Pesisir Selatan	BP3K Sumber Jaya BP3K Balik Bukit
7.	Lampung Selatan		BP3K Candi Puro BP3K Way Sulan BP3K Ketapang
8.	<b>Tanggamus</b>	<b>BP3K Talang Padang</b>	BP3K Wonosobo BP3K Pulau Panggung <b>BP3K Talang Padang</b>
9.	Pringsewu		BP3K Adi Luwih
10.	Mesuji		BP3K Simpang Pematang
11.	Tulang Bawang		BP3K Menggala BP3K Rawajitu Selatan
12.	Tulang Bawang Barat		BP3K Tumijajar
14.	Lampung Tengah		BP3K Terbanggi Besar
15.	Pesawaran		BP3K Padang Cermin

Sumber: Data Bakorluh Provinsi Lampung, 2011

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang memiliki BP3K Model terbanyak pada tahun 2010. BP3K model di Tanggamus yaitu BP3K Talang Padang, BP3K Wonosobo, dan BP3K Pulau Panggung . BP3K Talang Padang merupakan BP3K yang telah menjadi Model pada tahun 2008 dan 2010.

Keberhasilan suatu balai penyuluh pertanian tidak terlepas dari kinerja penyuluh pertanian yang ada di dalamnya. Kinerja penyuluh pertanian yang baik akan membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan penyuluh di lingkungan masyarakat akan lebih membantu petani dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam hal usahatani. Sebaran penyuluh per kecamatan di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data jumlah penyuluh per kecamatan di Kabupaten Tanggamus tahun 2010

No	Nama BP3K/Alamat	Jumlah Penyuluh (Orang)		
		PNS	THL	Total
1	BP3K Kota Agung	6	5	11
2	BP3K Kota Agung Timur	3	5	8
3	BP3K Kota Agung Barat	3	6	9
4	BP3K Bulok	5	4	9
5	BP3K Cukuh Balak	4	4	8
6	BP3K Limau	3	4	7
7	BP3K Kelumbayan Barat	3	3	6
8	BP3K Kelumbayan	1	4	5
9	<b>BP3K Pugung</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
10	<b>BP3K Talang Padang</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
11	BP3K Gunung Alip	5	7	12
12	BP3K Gisting	3	6	9
13	BP3K Sumber Rejo	5	6	11
14	BP3K Pulau Panggung	9	4	13
15	BP3K Air Naningan	5	3	8
16	BP3K Pematang Sawa	2	3	5
17	BP3K Semaka	2	5	7
18	BP3K Wonosobo	3	5	8
19	BP3K Ulu Belu	3	5	8
20	BP3K Bandar Negeri Semoung	3	4	7

Sumber: Data Bakorluh PPK Provinsi Lampung, 2011

Tabel 2 menunjukkan jumlah penyuluh terbanyak di Kabupaten Tanggamus adalah di BP3K Kecamatan Pugung yaitu berjumlah 16 orang penyuluh. BP3K Talang Padang menempati urutan kedua setelah BP3K Kecamatan Pugung yaitu sebanyak 14 orang penyuluh. BP3K Pugung merupakan BP3K bukan model, sedangkan BP3K Kecamatan Talang Padang merupakan BP3K Model.

BP3K merupakan wadah bagi penyuluh di kecamatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas penyuluhan. Keberadaan penyuluh di lingkungan masyarakat akan lebih membantu petani dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani, khususnya dalam hal usahatani sebagai mata pencaharian utama petani. Dengan demikian, petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya sehingga membantu peningkatan kesejahteraan petani.

Luas panen padi sawah di Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan sebesar 29 % dari 36.964 ha di tahun 2009 menjadi 47.684 ha di tahun 2010 dan produksinya meningkat 33 % menjadi 244.143 ton dibandingkan produksi tahun sebelumnya 183.566 ton. Sebaran luas panen, produksi, dan produktivitas padi sawah di Kabupaten Tanggamus tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah di Kabupaten Tanggamus tahun 2010.

No	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Wonosobo	2.100	10.859	5,17
2	Semangka	4.031	20.457	5,07
3	Bd.Negeri Semuong	1.957	9.932	5,07
4	Kota Agung	2.195	11.370	5,17
5	Pematang Sawa	3.167	16.342	5,16
6	Kota Agung Barat	5.136	26.574	5,17
7	Kota Agung Timur	4.606	23.859	5,17
8	Pulau Panggung	2.715	13.818	5,08
9	Ulu Belu	1.362	6.837	5,01
10	Air Naningan	650	3.221	4,95
11	<b>Talang Padang</b>	<b>2.852</b>	<b>14.773</b>	<b>5,17</b>
12	Sumber Rejo	1.770	9.151	5,17
13	Gisting	1.046	5.403	5,16
14	Gunung Alip	1.955	9.892	5,05
15	<b>Pugung</b>	<b>4.428</b>	<b>22.893</b>	<b>5,17</b>
16	Bulok	2.539	12.885	5,07
17	Cukuh Balak	1.913	9.699	5,07
18	Kelumbayan	1.551	7.794	5,02
19	Limau	628	3.122	4,97
20	Kelumbayan Barat	1.063	5.262	4,95
Jumlah		47.684	244.143	

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2011

Kecamatan Talang Padang memiliki BP3K yang telah menjadi model (lihat pada Tabel 1), bahkan telah dua kali menerima predikat BP3K Model yaitu pada tahun 2008 dan tahun 2010. Secara geografis, Kecamatan Talang Padang merupakan dataran tinggi, sedangkan Kecamatan Pugung sebagian merupakan dataran rendah dan sebagian merupakan dataran tinggi.

Produktivitas padi sawah tertinggi di Kabupaten Tanggamus adalah sebesar 5,17 toh/ha. Salah satunya adalah di Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Pugung.

Sebagian besar tanah atau lahan di Kecamatan Talang Padang digunakan untuk persawahan dan ladang, yaitu 41,99 % dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Talang Padang, sedangkan sisanya dipergunakan untuk perkebunan rakyat, pekarangan, kolam empang dan lainnya. Keadaan iklim di Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Pugung juga mendukung untuk budidaya tanaman padi.

Keberhasilan petani dalam meningkatkan hasil produksi salah satunya adalah karena adanya campur tangan dari para penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian memberikan pembinaan dan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Selain itu juga menyebarkan inovasi serta teknologi kepada para petani sehingga petani dapat mengembangkan dan meningkatkan produksi usahataniya.

Salah satu indikator adanya campur tangan penyuluh dalam perkembangan usahatani petani binaannya yaitu tingkat kinerja penyuluh pertanian itu sendiri. Apabila kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya telah baik, maka perkembangan petani yang dibinapun akan maksimal dan diharapkan kesejahteraan petani binaannya meningkat yang ditunjukkan melalui peningkatan produktivitas usahataniya. Oleh karena itu, penulis akan melihat kinerja penyuluh pertanian lapangan di BP3K Model Talang Padang dan hubungannya dengan tingkat produktivitas usahatani padi di Kecamatan Talang Padang. Sebagai pembandingan, penulis juga melihat kinerja penyuluh pertanian lapangan di BP3K Pugung serta tingkat produktivitas usahatani padi



di Kecamatan Pugung. Tingkat kinerja penyuluh dilihat dari bagaimana penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas pokok dalam berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di BP3K.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Apakah ada perbedaan antara kinerja PPL di BP3K Model Talang Padang dengan kinerja PPL di BP3K Pugung Kabupaten Tanggamus?
2. Apakah ada perbedaan antara produktivitas padi di wilayah kerja BP3K Model Talang Padang dan BP3K Pugung Kabupaten Tanggamus?
3. Apakah ada hubungan antara kinerja PPL dengan produktivitas padi di wilayah kerja BP3K Model Talang Padang Kabupaten Tanggamus?
4. Apakah ada hubungan antara kinerja PPL dengan produktivitas padi di wilayah kerja BP3K Pugung Kabupaten Tanggamus?

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Perbedaan antara tingkat kinerja PPL di BP3K Model Talang Padang dengan kinerja PPL di BP3K Pugung Kabupaten Tanggamus.
2. Perbedaan antara produktivitas padi di wilayah kerja BP3K Model Talang Padang dan BP3K Pugung Kabupaten Tanggamus
3. Hubungan kinerja PPL dengan produktivitas padi di Wilayah Kerja BP3K Model Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
4. Hubungan kinerja PPL dengan produktivitas padi di Wilayah Kerja BP3K Pugung Kabupaten Tanggamus.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan pengembangan ilmu dan referensi bagi penelitian sejenis.
2. Wahana pembelajaran penulis yang didapat dari bangku kuliah dengan yang ada di lapangan.
3. Bahan informasi bagi dinas pertanian atau instansi yang terkait dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di masa yang akan datang.
4. Bahan informasi bagi lembaga penyuluhan yang lainnya terutama lembaga penyuluhan di tingkat kecamatan.